

**KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MASYARAKAT DESA**

(Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) POLICY IN REDUCING
POVERTY OF RURAL SOCIETY***
(Case Study: Wargajaya Village, Cigudeg District, Regency Of Bogor, Jawa Barat)

SKRIPSI

**ISLAM FARUK ZAINI
E031171310**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MASYARAKAT DESA**
(Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

SKRIPSI

**ISLAM FARUK ZAINI
E031171310**



SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA (STUDI
KASUS: DESA WARGAJAYA, KECAMATAN CIGUDEG, KABUPATEN
BOGOR, JAWA BARAT)**

Disusun dan diajukan oleh

ISLAM FARUK ZAINI

E0311 71 310

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

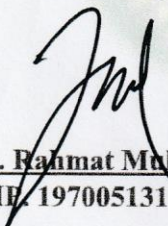
Pada tanggal 27 Agustus 2021

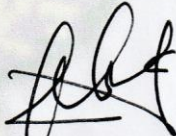
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
NIP. 1970051311997021002


Drs. Muh Iqbal Latief, M.Si
NIP. 19651016990021002

Mengetahui,
Ketua Departemen Sosiologi
FISIP Unhas


Des. Hasbi, M.Si, Ph.D
NIP. 4963082719911 1003



LEMBAR PENGESAHAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi

Pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

NAMA : ISLAM FARUK ZAINI

NIM : E031171310

JUDUL : KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS: DESA WARGAJAYA, KECAMATAN CIGUDEG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT)

Pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021

Tempat : Ruang Rapat Departemen Sosiologi

TIM EVALUASI

KETUA : Dr. Rahmat Muhammad, M.Si

(.....)

SEKERTARIS : Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si

(.....)

ANGGOTA : Drs. Andi Haris, M.Si., PhD

(.....)

Suryanto, S.Sos., M.Si

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Islam Faruk Zaini

Nim : E031171310

Judul : Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan dan pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Islam Faruk Zaini

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

(Q.S. Ibrahim:7)

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan karunia, kenikmatan, kebaikan, keberkahan, dan keridhoan-Nya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pujian dan shawat kepada Baginda Yang Mulia Nabi Muhammad SAW. yang atas kehadirannya kita bisa menikmati manisnya iman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda Ahmad Faruk Zaini, Lc dan Ibunda Enok Munjiah Idrus, Lc yang telah mendukung, memberikan semangat dan tak pernah lelah berkorban untuk penulis sejak penulis belia hingga dewasa. Kasih sayang merekalah yang menjadikan penulis dapat hidup dan bersyukur.

Juga kepada Adik-adikku Nisrin Azka Fajrina, Ahmad Umar Al-Faruk, Azza Imani Billah, Watsik Kamil Billah, Nismah Faruk Zaini dan Atabika Ihsan Al-Faruk yang selalu menemani, membantu dan memberikan guratan-guratan kehangatan dalam berkeluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karunia dan rahmat-Nyalah yang memberikan kesehatan dan kesempatan serta ilmu dan hikmah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tanpa nikmat yang Allah SWT. berikan kepada penulis, tentu penulis tidak bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT.

Kepada Bapak **Dr. Rahmat Muhammad, M.Si** sebagai Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, bantuan dan kepercayaannya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dan Bapak **Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si** selaku Pembimbing II, terima kasih untuk arahan yang telah diberikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Drs. Hasbi, M.Si., PhD selaku Ketua Departemen dan Dr. M. Ramli AT, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Drs. Andi Haris, M.Si., PhD dan Suryanto, S.Sos., M.Si yang telah bersedia menjadi penguji dalam sidang proposal dan skripsi, serta masukan-masukan yang diberikan untuk terus memperbaiki kualitas penulisan penulis.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam pendidikan di Departemen Sosiologi, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi pribadi penulis dan masyarakat umumnya. Semoga Bapak dan Ibu Dosen Allah SWT. limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin
4. Seluruh Staff Departemen Sosiologi yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menjadi mahasiswa. Terutama Bapak Pasmudir, S.Hum., M.Si dan Ibu Rosnaini, SE.
5. Kepada seluruh Pejabat Pemerintahan Desa Wargajaya yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan masyarakat Desa Wargajaya yang begitu hangat dalam menjadi informan.
6. Kepada Kakek Idrus Mustofa, Pamanda Hafid Malik dan Keluarga Besar Bani Mustofa yang telah banyak membantu selama penelitian.
7. Kepada Keluarga Besar Bani Zaini yang selalu menanyakan kemajuan dan perkembangan tugas akhir penulis, pemberian motivasi, serta doa-doa yang dipanjatkan.
8. Kepada Adik-adikku Nisrin, Umar, Billah, Watsik, Nismah dan Atabika yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Kepada teman-teman Sosiologi Angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama dalam mengapai cita-cita bersama.

10. Serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi banyak, baik dalam dukungan moral maupun materil. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi masih terdapat kekurangan, sebab tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan arahan yang membangun. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. yang Maha Agung lagi Maha Esa.

Makassar, 18 Agustus 2021

Islam Faruk Zaini

ABSTRAK

Islam Faruk Zaini, E031171310. “Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)” dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Muh. Iqbal Latief

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang berada di wilayah pedesaan dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program *Sustainable Development Goals*.

Subjek dalam penelitian ini adalah 4 Pemerintah Desa Wargajaya, 1 Pendamping Lokal Desa, 1 Ketua RW dan 3 Masyarakat Desa Wargajaya. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif, yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Tujuan penelitian yang digunakan adalah deskripsi, mengemukakan gambaran mengenai suatu fenomena yang terdapat di lapangan secara sistematis dan faktual. Dasar penelitian adalah studi kasus yang berguna untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian, sehingga dapat menemukan suatu lingkup fenomena tertentu yang terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *Sustainable Development Goals* pemerintah Desa Wargajaya mengaplikasikan program turunan yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu SDGs Desa. SDGs Desa dalam pengaplikasiannya ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap para warga, perangkat desa (desa) dan rukun warga (RW). Hal itu ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran yang konkret mengenai persoalan dan kehidupan masyarakat di Desa Wargajaya. Tentu saja, terdapat program-program bantuan bagi masyarakat miskin di Desa Wargajaya berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tujuannya adalah sebagai stimulus bagi masyarakat Desa Wargajaya yang berada dalam kategori masyarakat miskin. Masyarakat Desa Wargajaya tidak memahami program SDGs Desa itu, karena tidak terdapat sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program SDGs Desa tentang tujuan dan manfaat SDGs Desa bagi masyarakat. Masyarakat lebih memahami dan mengetahui program-program konkret berupa bantuan-bantuan yang berbentuk uang dan sembako.

Kata Kunci : SDGs, SDGs Desa, Bantuan, Miskin.

ABSTRACT

Islam Faruk Zaini, E031171310. "Sustainable Development Goals (SDGs) Policy in Poverty Reduction of Village Communities (Case Study: Wargajaya Village, Cigudeg Subdistrict, Bogor Regency, West Java Province)" was guided by Rahmat Muhammad and Muh. Iqbal Latief

The purpose of this research is to find out the form of implementing sustainable development goals (SDGs) in poverty reduction in rural areas and to know people's perception of the program implementation of Sustainable Development Goals.

The subject on this research are four government staff of Desa Wargajaya Village, one Village companion, one RW chairman and three society of Wargajaya Village. This research approach is used qualitative method, which starts with data and goes down to conclusions. The purpose of the research used is a description, presenting a picture of a phenomenon that exists in the field systematically and factually. The basis of research is a useful case study for collecting and analyzing a particular process related to the focus of research, so as to find a limited scope of certain phenomena.

The results show that in implementing the Sustainable Development Goals, the Wargajaya Village government applies a derivative program launched by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, namely the SDGs Desa. The SDGs Desa in their application are intended to collect data on residents, village officials (village) and community associations (RW). This is intended to get a concrete picture of the problems and life of the people in Wargajaya Village. Of course, there are assistance programs for the poor in Wargajaya Village in the form of Uninhabitable Houses (RTLH), Village Fund Direct Aid (BLT-DD) and Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) whose purpose is as a stimulus for the Wargajaya Village community. who are in the category of poor people. The Wargajaya Village community did not understand the SDGs Desa's program, because there was no socialization to the community regarding the program of SDGs Desa about the objectives and benefits of the SDGs Desa for the community. The community understands and knows more about concrete programs in the form of assistance in the form of money and basic necessities.

Key Words: SDGs, SDGs Desa, Poverty, Aid.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Kemiskinan dan SDGs Desa.....	10
B. Kajian Mengenai Pengembangan Masyarakat	20
C. Teori Yang Relevan.....	24
1. Teori Pembangunan	24
2. Interaksionisme Simbolik	26
D. Penelitian Terdahulu	28
E. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Dasar dan Tipe Penelitian	31
B. Teknik Penentuan Informan	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Desa Wargajaya	39
B. Jumlah Penduduk	40
C. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	41
D. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
E. Sarana Dan Prasarana Desa Wargajaya.....	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Profil Informan.....	45
B. Pengentasan Kemiskinan Melalui SDGs Desa.....	49
C. Persepsi Warga Terhadap Pengentasan Kemiskinan SDGs Desa	61
D. Masalah-Masalah Penerapan SDGs Di Desa	65
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dana Desa Wargajaya.....	5
Tabel 2 Rancangan Anggaran Belanja Desa Wargajaya Tahun 2020	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4 Penentuan dan Jumlah Informan.....	33
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	40
Tabel 6 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	41
Tabel 7 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
Tabel 8 Sarana dan Prasarana	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	30
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Proses Wawancara	79
Lampiran 2 Dokumentasi Wilayah	83
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Kab. Bogor	87
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	88
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	889
Lampiran 6 Transkrip Wawancara.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berskala dunia yang sifatnya universal, tanpa mendikotomikan antara negara berkembang dan negara maju. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian bersama untuk membangun visi global bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kewajiban bagi seluruh negara di dunia. Mengingat bahwa sebelumnya telah terbentuk program pembangunan dengan tujuan serupa SDGs, meskipun cakupan yang dimilikinya tidak seluas dan seambisius SDGs, yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs). Namun, MDGs dalam pelaksanaannya tidak bersifat terbuka, yang mana hanya menjadikan negara-negara berkembang sebagai objek dari pembangunan. Implikasi dari objektivikasi negara berkembang dalam pembangunan MDGs adalah bahwa negara-negara berkembang hanya menjadi ajang program pembangunan yang diselenggarakan oleh negara-negara adidaya (Woodbridge 2015).

SDGs terlahir sebagai respon dari rasa kepedulian bersama untuk mewujudkan sebuah planet yang adil, aman dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia untuk memperjuangkan kehidupan di bumi, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. SDGs merefleksikan prinsip moral bahwa tidak ada satupun negara yang boleh berada dalam keadaan tertinggal, sementara negara lain mengalami kesejahteraan; setiap individu dan negara bertanggungjawab untuk memainkan

peran mereka dalam menyampaikan visi global mengenai SDGs (Osborn, Cutter, and Ullah 2015).

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs mempunyai 17 tujuan yang tergambar dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling berkaitan. Untuk mensukseskan dan menjadikan SDGs sebagai program yang mampu memberikan kesejahteraan secara universal, SDGs memiliki 3 pilar dalam pelaksanaannya, yaitu 1) pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; 2) pilar ekonomi, pembangunan ekonomi; dan 3) pilar lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati (Murniningtyas and Alisjahbana 2018).

Tujuan pertama yang ingin diselesaikan dan ditekankan oleh SDGs adalah “*No Poverty* (menghilangkan kemiskinan).” Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional, yang dari persoalan kemiskinan mampu menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan lain. Oleh karena kemiskinan mampu menciptakan persoalan-persoalan sosial baru dalam kehidupan, maka kajian mengenai kemiskinan sering disebut sebagai “kajian abadi” yang terus-menerus dan dicarikan solusinya.

Bagi negara Indonesia, kemiskinan masih merupakan persoalan utama dan beban berat bagi setiap pemerintahan, terutama jika dikaitkan dengan disparitas yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentunya Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan persoalan kemiskinan yang terjadi (Ishartono and Raharjo 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut menjadi komitmen Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan/SDGs untuk melaksanakan dan turut serta dalam mencapai pembangunan global yang tercantum dalam SDGs. Dengan keluarnya Peraturan Presiden mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara otomatis seluruh provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk mengeksekusi Peraturan Presiden nomor 59 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar kesenjangan yang terjadi antara setiap provinsi, perkotaan dan pedesaan bisa diminimalisir sebaik mungkin dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 bulan Maret tercatat sebesar 26,24 juta masyarakat Indonesia berada dalam kategori miskin. Jika dibandingkan dengan data bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%. Angka ini meningkat sebanyak 0,37% dari Maret 2019 yang sebesar 9,41% (Taufiq, Pratiwi, and Fatmawati 2020)

Salah satu ciri kemiskinan di Indonesia adalah tingginya disparitas antara perkotaan dan pedesaan. Yang mana wilayah pedesaan mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pada Maret 2020 tercatat tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,38% (11,16 juta orang), adapun di pedesaan tercatat hampir dua kali lipat yaitu sebesar 12,82% (15,26 juta orang). Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan data

di tahun 2019, di mana untuk wilayah perkotaan sebesar 6,56% dan pedesaan sebesar 12,60% (Badan Pusat Statistik 2020).

Untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan, pemerintah Indonesia pada tahun 2020 mengeluarkan program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa). Tujuannya adalah sebagai program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga dana desa tahun 2021 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Adapun latar belakang kehadiran SDGs desa adalah: (1) dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah; dan (2) dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Dalam SDGs Desa, terdapat delapan tipe desa yang berfungsi sebagai arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Adapun kedelapan tipe desa adalah sebagai berikut (Siswanto 2021): (1) Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Desa Ekonomi Tumbuh Merata; (3) Desa Peduli Kesehatan; (4) Desa Peduli Lingkungan; (5) Desa Peduli Pendidikan; (6) Desa Ramah Perempuan; (7) Desa Berjejaring; dan (8) Desa Tanggap Budaya.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tidak luput dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Wilayah Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak, maka persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat tidak bisa dianggap sepele. Tahun 2020 jumlah masyarakat miskin yang berada di wilayah Jawa Barat

sebanyak 3,92 juta orang dengan presentase 7,88%. Angka tersebut merupakan sebuah persoalan serius, di mana kebanyakan wilayah Jawa Barat adalah pedesaan (Prasetya, Taufiq, and Mumtaz 2020).

Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang berada dalam naungan Provinsi Jawa Barat. Desa Wargajaya merupakan desa dengan pendapatan dana desa yang hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Adapun anggaran dana desa sebagai berikut.

Tabel 1 Dana Desa Wargajaya

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Dana	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Desa	685,204,999	873,314,752	1,200,095,960	1,228,056,168	1,320,296,000

Sumber: (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 2020a)

Jumlah dana desa yang besar tidak berbanding lurus dengan penggunaannya yang maksimal, khususnya dibidang pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2020, rincian penggunaan dana desa di Desa Wargajaya sebagai berikut.

Tabel 2 Rancangan Anggaran Belanja Desa Wargajaya Tahun 2020

Nomor	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Rp. 30,000,000
2	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Rp. 569,096,000

3	Kegiatan penanggulangan bencana	Rp. 30,000,000
4	Penanganan keadaan mendesak	Rp. 691,200,000

Sumber: (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 2020a)

Melihat tabel di atas, terlihat bahwa pemerintah desa tidak memiliki niat yang serius untuk melakukan pengentasan kemiskinan di wilayah Desa Wargajaya. Sebagaimana yang tercantum dalam Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi jumlah kepala keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjumlah 232 keluarga. Hal itu bisa menjadi indikator bahwa jumlah keluarga miskin di wilayah Desa Wargajaya cukup banyak, namun hal tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah desa yang terlihat dari tidak adanya anggaran mengenai penanggulangan kemiskinan.

Ditambah dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wargajaya tahun 2019 disebutkan bahwa terdapat 2.201 keluarga miskin dari 2.249 kepala keluarga yang ada di Desa Wargajaya, hal itu menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Desa Wargajaya hidup dalam kondisi kemiskinan. Hal itu menunjukkan bahwa selama ini arah pembangunan yang terjadi di Desa Wargajaya masih belum terarah secara baik untuk mewujudkan desa yang mandiri dan makmur, begitu juga dengan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan desa untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi desa.

Implikasi yang ditimbulkan oleh kemiskinan mampu menjadikan suatu negara mengalami kekacauan karena ketidakpuasan masyarakat akan pemerintah yang tidak mampu memberikan dan menjamin kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Selain itu, sebab kemiskinan jutaan anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tingkat kematian yang tinggi, kesulitan membiayai pengobatan, tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, kurangnya jaminan sosial dan keselamatan, dan masih banyak lagi dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh kemiskinan (Prawoto 2009). Maka persoalan kemiskinan tidak bisa dianggap remeh.

Tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan tidak hanya berada pada pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat juga diharuskan untuk mengambil peran dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan akan menjadi kunci kesuksesan penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Kerjasama adalah keniscayaan demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penelitian terdahulu mengenai SDGs dengan tujuan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Saudari Ayu Oktaviani Musri (2020) dengan judul penelitian *“Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan.”* Temuan yang didapatkan adalah bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi adalah mengacu kepada program-program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dikatakan

berhasil oleh peneliti sebab mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 18.461 KK. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan prosedur.

Alasan peneliti mengambil Desa Wargajaya sebagai lokasi penelitian yang pertama ialah (1) tingkat keluarga miskin yang berada di wilayah Desa Wargajaya sangat tinggi; (2) Desa Wargajaya merupakan wilayah yang mudah diakses oleh peneliti dan menjadi kampung halaman peneliti; (3) salah satu desa swakarya yang mengandalkan pertanian tanpa ada potensi yang lain; dan (4) tingkat pendidikan yang rendah di Desa Wargajaya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai arah pembangunan dan penggunaan dana desa yang masih belum berpihak kepada program pengentasan kemiskinan di wilayah Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian tentang kebijakan sosial pemerintah desa terhadap kemiskinan, sehingga memberikan peneliti semangat untuk mengambil judul **“Kebijakan Sustainable Development Goals Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa (Studi Kasus Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang tersaji di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan SDGs oleh Pemerintah Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Jawa Barat dalam mengurangi kemiskinan?

2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Jawa Barat dalam pelaksanaan SDGs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Jawa Barat dalam menyusun program pengentasan kemiskinan;
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Jawa Barat atas program SDGs yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademik

Memberikan kontribusi atas ilmu yang telah dipelajari bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dibidang sosiologi tentang program pengentasan kemiskinan pemerintah desa.

2. Aspek Praktis

- a. Sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Desa Wargajaya dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan;
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat Desa Wargajaya untuk mengetahui mengenai program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wargajaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kemiskinan dan SDGs Desa

Kajian mengenai kemiskinan di Indonesia masih merupakan hal yang menarik bagi setiap peneliti dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beragam pendekatan dan program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun tidak menemukan hasil yang memuaskan.

Fenomena kemiskinan memang sangatlah kasatmata sebagai realitas yang berlapis-lapis. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level ketiadaan makanan (Syawie 2011).

Menurut Louis-Marie (2015) kemiskinan merupakan permasalahan yang mengandung berbagai bentuk ketidakadilan, yang mana adalah sebuah sumber dari pencegahan sosial dalam pendistribusian kondisi kehidupan yang esensial terhadap martabat manusia. Kondisi-kondisi kehidupan ini sesuai dengan kapabilitas individu, rumah tangga dan komunitas untuk mempertemukan kebutuhan dasar mereka dalam dimensi sebagai berikut: 1) pendapatan; 2) pendidikan; 3) kesehatan; 4) makanan/nutrisi; 5) air bersih/sanitasi; 6) pekerjaan; 7) perumahan; 8) akses terhadap aset produktif; 9) akses terhadap pasar; dan 10) partisipasi dalam komunitas/kedamaian.

Pandangan yang lebih jauh terhadap kemiskinan telah dijabarkan oleh Robert Chambers dalam jurnalnya yang berjudul "*Poverty and livelihoods: whose reality*

counts?” (1995) dan menyebutkan bahwa terdapat delapan penyimpangan yang terjadi sehingga menghasilkan kemiskinan yang bersifat multidimensi. Kedelapan penyimpangan tersebut dapat dilihat faktor-faktor yang tidak terlihat namun memiliki korelasi terhadap kemiskinan. Adapun delapan (8) penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

1). **Poverty** (kekurangan) yang merujuk kepada ketiadaan pendapatan, aset dan kebutuhan fisik. *Poverty* juga menyertakan hal-hal yang lebih dari sekedar pendapatan yang sedikit. Kekurangan dapat dibedakan dari dimensi-dimensi penyimpangan yang lain seperti kelemahan fisik, terisolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan.

2). **Social inferiority** (inferioritas sosial) bisa diturunkan, didapatkan atau dikaitkan dengan hidup dan lingkaran kehidupan. Inferioritas sosial bisa didefinisikan secara sosial sebagai inferior atau ketidakberuntungan, mengikutkan gender, kasta, ras dan kelompok etnik, atau merasa ‘lebih rendah’ dalam istilah kelas, kelompok sosial atau pekerjaan.

3). **Isolation** (isolasi) merupakan kondisi terpinggirkan dan terjauhkan. Orang-orang miskin dapat terisolasi secara geografi – kehidupan di area terbelakang; terisolasi komunikasi, ketiadaan hubungan dan informasi, serta tidak mampu membaca; terisolasi oleh kesulitan akses untuk mendapatkan pelayanan sosial dan pasar; dan terisolasi dengan ketiadaan dukungan ekonomi dan sosial.

4). **Physical weakness** (Tubuh yang lemah) bisa berupa disabilitas, penyakit dan luka. Tubuh yang rentan terhadap penyakit dan keterbatasan menjadikan

seseorang berada dalam kondisi yang sulit dan terbatas. Mereka yang memiliki tubuh rentan cenderung tidak mampu menjadi individu yang produktif dan aktif, sehingga memiliki ketergantungan dengan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan harian. Memiliki keluarga yang seperti ini juga bisa menjadi hambatan, sebab ketidakmampuan mereka untuk berkontribusi dalam penghidupan keluarga.

5). **Vulnerability** (Kerentanan) berarti tidak kurang dan ingin, melainkan eksposur dan ketidakberdayaan. Kerentanan memiliki 2 sisi: sisi eksternal dari exposure terhadap guncangan, resiko dan stres; dan sisi internal dari ketidakberdayaan, berarti kekurangan sarana untuk mengatasi persoalan yang ada. Kerentanan bisa menjadi kondisi di mana individu/kelompok berada dalam perasaan kurang aman, sebab tidak adanya jaring pengaman yang bisa menjadi jaminan bagi mereka yang masuk ke dalam wilayah yang rentan.

6). **Seasonality** (musiman) berdampak kepada mereka yang bekerja atau mendapatkan hasil dari pertanian atau laut. Ketika musim penghujan tiba, petani akan mengalami kesulitan untuk menanam komoditas yang menjanjikan; begitu juga dengan para nelayan, badai yang hebat bisa menyebabkan mereka tidak bisa mencari ikan di laut. Dengan demikian menyebabkan ketidakpastian dalam usaha pemenuhan kebutuhan.

7). **Powerlessness** (Ketidakberdayaan): orang-orang miskin adalah orang yang tidak berdaya. Jauh dan cemas ketika mereka ingin mengakses sumber daya, pekerjaan dan pendapatan, ketidakberdayaan menjadikan mereka sulit untuk

mengatur dan bernegosiasi. Seringkali lemah secara fisik dan rentan secara ekonomi, mereka tidak memiliki pengaruh.

8). **Humiliation** (penghinan): harga diri, dengan kebebasan dari ketergantungan, penghinaan mungkin menjadi dimensi yang paling terlihat dan jarang dipertimbangkan. Mereka yang berada dalam kondisi ini kurang mampu untuk mencari cara dalam mendapatkan akses, misalnya adalah kredit. Mereka yang miskin, cenderung takut untuk mengajukan pinjaman, hal itu dikarenakan ada perasaan untuk dihina dan diganggu, baik secara fisik ataupun mental.

Mengenai kasus kemiskinan di wilayah pedesaan, Robert Chambers dalam bukunya yang berjudul “*Rural Development Putting the Last First*” (Chambers 2013) mengelaborasi lebih jauh mengenai penyebab dari kemiskinan di wilayah pedesaan. Adapun 3 hal yang menjadi ciri kemiskinan di wilayah pedesaan, yaitu:

1) **Social Convention** (adat istiadat): adat istiadat seringkali menjadi suatu nilai yang harus dijunjung sebagai bentuk penghormatan kepada nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat, karena keluhuran tersebut masyarakat seringkali merasa enggan atau segan untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang ada, meskipun masyarakat merasa terbebani dengan tradisi yang ada. Adat istiadat yang membuat tuntutan menjadi berat tergambarkan dalam bentuk mahar, pemakaman dan pernikahan. Contohnya dalam masyarakat Indonesia seringkali ketika seorang individu telah meninggal, tradisi di masyarakat mengharuskan untuk mengadakan malam do’a bersama untuk mengenang kebaikan dan berharap sang mayit mendapatkan ampunan dari

Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu dilakukan menurut tradisi pada malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, dan 40 harian. Adat istiadat yang seperti itu cenderung memberatkan dan membebani keluarga yang ditinggalkan, karena keluarga yang ditinggalkan harus menyiapkan sajian-sajian makanan kepada masyarakat yang diundang, yang tentu saja memerlukan pengeluaran yang besar, apalagi jika hal itu diumumkan di masjid-masjid yang secara otomatis akan memperbanyak tamu yang datang.

- 2) ***Unproductive Expenditure*** (pengeluaran yang tidak produktif): pengeluaran yang tidak produktif mengambil banyak bentuk di masyarakat. Ini bisa menyertakan narkoba, minuman keras atau konsumsi yang mahal dan sia-sia. Masyarakat miskin yang merasa berada dalam tekanan seringkali membutuhkan bentuk pelampiasan yang dianggap sebagai jalan satu-satunya menenangkan pikiran, bukannya mengelola modal atau uang yang ada untuk digunakan dalam investasi, pendidikan atau membeli peralatan pertanian, mereka yang berada dalam kondisi ini justru lebih menyukai mabuk-mabukan dan narkoba sebagai cara yang dianggapnya mampu memberikan kebahagiaan meskipun kondisi mereka berada dalam kesulitan.
- 3) ***Exploitation*** (eksploitasi): menjadi salah satu persoalan yang dialami oleh mereka yang masuk dalam kondisi miskin. Ketiadaan modal dan uang mengharuskan masyarakat miskin untuk meminjam uang kepada para rentenir yang secara stratifikasi sosial lebih berkuasa dan memiliki pengaruh dibandingkan mereka. Meskipun dengan bunga yang tinggi, masyarakat

mau tidak mau untuk melakukan hal itu, dikarenakan mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan bantuan modal atau uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bunga yang tinggi dibarengi dengan jaminan pinjaman yang tidak masuk akal, seperti tanah, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Yang mana, jika masyarakat tidak mampu membayar, aset yang mereka jaminkan akan berpindah tangan. Ketidakberdayaan masyarakat dijadikan suatu keuntungan oleh oknum-oknum yang bertopeng dengan dalih membantu masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 bulan Maret tercatat sebesar 26,24 juta masyarakat Indonesia berada dalam kategori miskin. Jika dibandingkan dengan data bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%. Angka ini meningkat sebanyak 0,37% dari Maret 2019 yang sebesar 9,41% (Taufiq et al. 2020).

Kenaikan angka kemiskinan dapat memberikan perasaan ketidakberdayaan, *fatalistic*, putus asa, yang pada orang tertentu dapat membawa mereka kepada tindakan bunuh diri. Tempo mewartakan pada tahun 2014 bahwa masyarakat di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yang mana kemiskinan tersebut menyebabkan masyarakat Gunung Kidul melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini diperkuat dengan data yang ada, sejak tahun 2005-2012 telah terjadi 250 tindakan bunuh diri (Tempo.co 2014).

Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional, yang mana dalam melakukan pengukuran dan pengentasan kemiskinan dimensi yang digunakan tidak boleh hanya disandarkan kepada aspek ekonomi. Melainkan juga harus melihat aspek-aspek lain yang terkait dengan kemiskinan secara integral dan holistik (Malul 2020).

Sifat kemiskinan yang multidimensional memerlukan penanggulangan kemiskinan dengan mempertimbangkan dimensi ketidakberdayaan karena kemelaratan yang akut, dimensi ketimpangan struktural dan kemandekan perekonomian yang mengancam kesejahteraan seluruh masyarakat (Prasetyantoko et al. 2012).

Para Sosiolog membedakan kemiskinan menjadi dua (Wardaya et al. 2018), yaitu:

1. *Kemiskinan Absolut* adalah kemiskinan yang terjadi ketika individu atau kelompok tidak bisa mendapatkan kebutuhan untuk mendukung tingkat kesehatan fisik dan efisiensi minimum yang sering diekspresikan dalam istilah tingkat ketercukupan kalori atau nutrisi.
2. *Kemiskinan Relatif* adalah kemiskinan yang ditentukan oleh standar hidup umum dalam berbagai masyarakat dan apa yang secara kultural didefinisikan sebagai miskin daripada tingkat kemiskinan yang absolut.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah Indonesia ikut menyelenggarakan program SDGs demi mengurangi persoalan

kemiskinan. SDGs adalah program pembangunan yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, yang dideklarasikan pada September 2015.

Keikutsertaan Indonesia dalam program SDGs disebabkan masih terdapat pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari program pembangunan sebelumnya, yaitu MDGs. Pekerjaan rumah yang tersebut meliputi persoalan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum, penurunan angka kematian ibu, penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, serta disparitas capaian target antarprovinsi yang masih tinggi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2020)

Sebagai negara kesatuan, tentu implementasi yang dilaksanakan harus berbanding lurus dengan integrasi dan proses sosialisasi ke tiap-tiap wilayah provinsi yang berada di bawah naungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memanfaatkan aspek desentralisasi pemerintahan untuk menanamkan SDGs dalam tiap-tiap rancangan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh provinsi.

Pada tahun 2020 Indonesia mengeluarkan program turunan dari SDGs Nasional menjadi SDGs Desa, yang mana hal ini tujukan sebagai upaya dalam menciptakan kesetaraan dan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Indonesia diketahui memiliki jumlah desa yang banyak, berjumlah 74.943 desa. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan pembangunan di wilayah pedesaan

dalam rangka pemberdayaan, pemerataan dan penghidupan yang adil dan berkemanusiaan di desa.

SDGs Desa dalam Permendesa PDPTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diartikan sebagai upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa ramah lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kemendes PDPTT 2020).

Terlihat bahwa SDGs Desa akan memberikan klasifikasi program desa berdasarkan proyeksi tujuan pembangunan yang dimiliki desa. Terdapat 7 model desa yang ingin dibangun oleh pemerintah melalui program SDGs Desa yang berdasarkan pengentasan-pengentasan permasalahan yang selama ini terjadi di pedesaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa desa di Indonesia setidaknya memiliki 7 pokok masalah yang harus diselesaikan dan ditangani sebaik mungkin. Jawaban yang diberikan oleh pemerintah ialah dengan program SDGs Desa.

Jika dalam SDGs Nasional terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai, maka di dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan, bertambah 1 tujuan dari SDGs Nasional atau Internasional. Adapun ke-18 tujuan dari SDGs Desa sebagai berikut: 1) Desa tanpa kemiskinan; 2) Desa tanpa kelaparan; 3) Desa sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan desa berkualitas; 5) Keterlibatan perempuan desa; 6) Desa layak air bersih dan sanitasi; 7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; 8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; 9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; 10) Desa tanpa

kesenjangan; 11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; 12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; 13) Desa tanggap perubahan alam; 14) Desa peduli lingkungan laut; 15) Desa peduli lingkungan darat; 16) Desa damai berkeadilan; 17) Kemitraan untuk pembangunan desa; dan 18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Selain itu, kehadiran SDGs Desa juga sebagai bentuk optimalisasi penggunaan Dana Desa (DD) yang selama ini diberikan kepada desa untuk menciptakan iklim inklusif dari pembangunan. Dengan adanya SDGs Desa, tujuan yang harus diambil oleh desa menjadi lebih jelas, terarah dan terukur. Sehingga, pencapaian yang maksimal akan lebih mudah didapatkan oleh desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Kesetaraan yang merupakan salah satu isu yang dibangun oleh SDGs, kesenjangan yang selama ini terjadi harus ditanggulangi secara maksimal, di mulai dari peran pemerintah desa untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan berkelanjutan. Pentingnya keterlibatan pemerintah desa disebabkan banyaknya wilayah pedesaan yang ada dan pemerintah desa lebih dekat serta mengakar dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi.

Salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan/SDGs ialah tidak ada yang tertinggal dibelakang dalam masalah pembangunan. Sifatnya yang terbuka harus didasari dengan pembangunan yang bersifat inklusif, di mana semua pihak mendapatkan porsi yang sejajar dalam pembangunan. Persoalan yang diangkat oleh SDGs adalah persoalan yang terjadi sehari-hari. Oleh karena persoalan yang ingin

diselesaikan oleh SDGs adalah persoalan di kehidupan sehari-hari, maka peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam melaksanakan program SDGs yang berbasis inklusivitas dan kesetaraan.

B. Kajian Mengenai Pengembangan Masyarakat

Satu tragedi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community development*) adalah bahwa pendekatan yang diterapkan seringkali terlalu terkesima oleh, untuk tidak menyatakan sangat mengagungkan, konteks lokal. Sedangkan sistem sosial yang jauh lebih luas yang menyangkut pembangunan sosial, kebijakan sosial, relasi kekuasaan, ketidakadilan gender, eksklusifisme, pembelaan hak-hak publik dan kesetaraan sosial kurang mendapat perhatian (Suharto, 2014).

Pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat adalah suatu metode yang dilaksanakan dalam rangka pekerja sosial, di mana seorang pekerja sosial memiliki tugas sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat menemukan jati diri dengan harapan masyarakat dapat mengetahui kekuatan yang mereka miliki untuk bangkit mendapatkan kesejahteraan sosial.

Beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, sebagai berikut (dalam Widayanti, 2012).

- 1) Adams mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai *“the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.”* Berdasarkan definisi tersebut

pemberdayaan masyarakat adalah bentuk partisipasi masyarakat di dalam pelayanan guna membantu diri mereka sendiri dengan bergerak secara bersama, yang pergerakan tersebut dilakukan untuk mengambil langkah konkret dalam bekerja sama, kemandirian dan advokasi.

- 2) Surjono dan Nugroho mendefinisikan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.
- 3) Wrihatnolo dan Nugroho memberikan pengertian terhadap konsep pemberdayaan mencakup makna *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan didasarkan kepada masyarakat) dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* (pembangunan yang diarahkan masyarakat).
- 4) Jhon Friedman mengartikan pemberdayaan sebagai *alternative development*, yang menghendaki *'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity.'*

Pengembangan masyarakat dilaksanakan sebagai tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapisan bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama (Zubaedi 2013). Pengembangan masyarakat juga salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan prinsip partisipasi sosial (Suharto 2014).

Menurut Midgley (dalam Rumikno Adi, 2018) pemenuhan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh masyarakat dari segi kondisi dapat diidentifikasi dengan tiga elemen utama, yaitu:

- 1) Tingkatan di mana suatu masalah sosial dapat dikelola (*the degree to which social problems are managed*);
- 2) Sejauhmana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi (*the extent to which needs are met*);
- 3) Tingkatan di mana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah (*the degree to which opportunities for advancement are provided*).

Pemberdayaan juga berarti hal-hal yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda, perbedaan ini didapatkan dari kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, dilandasi berbagai macam latar belakang penyebab ketidakberdayaan yang mengharuskan adanya pemberdayaan. Aspek yang dilaksanakan dalam proses pemberdayaan tidak hanya mengacu kepada persoalan ekonomi, melainkan juga mencakup aspek sosial, kesehatan, lingkungan, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena luasnya cakupan mengenai pemberdayaan, sinergi antar berbagai elemen dalam proses pemberdayaan menjadi keniscayaan.

Tugas fasilitator dalam mengembangkan masyarakat adalah memberikan arahan bagi masyarakat, yang mana nantinya masyarakat diharuskan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka sendiri serta memberikan jawaban atas permasalahan dan kebutuhan mereka.

Menurut Ferdian T. Nasdian (2015) setidaknya terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pendampingan, yaitu:

1) Pendekatan Menolong Diri Sendiri (*self-help*)

Pendekatan ini berarti di mana masyarakat menjadi partisipan yang dalam proses pembangunan dan melakukan kontrol dalam kegiatan pengembangan komunitas. Pendamping menjadi fasilitator, sedangkan anggota komunitas memegang tanggungjawab utama dalam: (1) memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya; (2) bagaimana memenuhi kebutuhan itu; dan (3) mengerjakannya sendiri.

2) Pendekatan Teknik (*technic assistance*)

Pendampingan teknik merupakan pendekatan yang mendasarkan pada perkiraan kebutuhan oleh para perencana yang dapat mengantarkan dan mengevaluasi proses pembangunan masyarakat. Perencana seolah-olah ditugasi oleh masyarakat untuk mengembangkan sikap rasionalitas mereka. Pengembangan masyarakat dari perspektif ini bersifat spesifik mencakup pengembangan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan.

3) Pendekatan Konflik

Pendekatan ini menekankan pada usaha-usaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa apa yang baik dilakukan oleh orang lain adalah baik juga untuk dilakukannya. Dalam konteks pengembangan masyarakat, maka pendampingan dilakukan dengan teknik progpaganda sedemikian rupa sehingga anggota komunitas menyadari apa yang menjadi ketertinggalannya dengan komunitas lain.

Jack Rothman (dalam Suharto, 2014) membagi model pengembangan masyarakat ke dalam 3 model dalam memahami konsepsi pengembangan masyarakat, yaitu: (1) Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*); (2) Perencanaan sosial (*social planning*); dan (3) Aksi sosial (*social action*). *Pertama*, pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak dilihat sebagai klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang memiliki potensi dan sumber daya yang belum dikembangkan secara penuh. *Kedua*, perencanaan sosial di sini merujuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan tertentu dalam memecahkan permasalahan sosial tertentu seperti kemiskinan, kenakalan remaja, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Dan yang *ketiga*, aksi sosial yang bertujuan pada perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*).

C. Teori Yang Relevan

1. Teori Pembangunan

Pembangunan mempunyai arti yang dinamis, maka tidak boleh dilihat sebagai konsep yang statis. Perkembangan selalu terjadi dalam pembangunan, utamanya adalah konsep mengenai perubahan. Dalam pembangunan, hal yang ingin dicapai adalah suatu kesejahteraan, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.

Pembangunan menunjukkan suatu proses kemajuan berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Jamaludin 2016) pembangunan setidaknya memiliki tiga tahapan, yaitu (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap evaluasi.

- 1) Tahap perencanaan terjadi sebelum pembangunan dilaksanakan, di mana pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Selain menyerap aspirasi, pemerintah juga harus memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan masyarakat.
- 2) Tahap pelaksanaan adalah lanjutan dari tahap perencanaan. Segala sesuatu yang tertuang dalam rencana harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pada tahap ini, terdapat tiga cara pelaksanaan, yaitu a) secara struktural, b) secara spiritual, dan c) gabungan dari kedua cara tersebut (struktural dan spiritual).
- 3) Tahap evaluasi digunakan untuk mengukur dan mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum. Di tahap ini dilakukan suatu analisis terhadap akibat dan efek dari perubahan sosial yang terjadi selama proses pembangunan. Dengan adanya evaluasi akan ditemukan aspek-aspek yang kurang, macet dan mundur dari suatu pembangunan, yang mana hal itu dijadikan dasar untuk melakukan upaya perbaikan dari suatu proses pembangunan.

Secara umum dikenal dua pendekatan dalam pengambilan kebijakan terhadap suatu pembangunan, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pembangunan tidak bersifat *top-down* atau kebijakan yang berasal dari atas ke bawah (Digdowiseiso 2012). *Top* yang dimaksud adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah atau struktur sosial tertentu, sedangkan *down* ialah masyarakat yang berada di barisan terbawah dari suatu kebijakan, yang seringkali dianggap sebagai objek dari suatu pembangunan. Pembangunan dengan model *top-down* cenderung menjadikan masyarakat sebagai kalangan yang tidak sadar dan memahami kebutuhan akan perubahan dan kemajuan, oleh karena itu pemerintah selalu mengeluarkan program-program pembangunan yang diasumsikan dapat menjadi jawaban bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kebijakan *top-down* seringkali masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan atau program suatu pembangunan

Lawan dari kebijakan *top-down* adalah kebijakan *bottom-up*. Pada pendekatan *bottom-up* fokus perhatian terjadi kepada para pembuat kebijakan level bawah dan masyarakat (kelompok sasaran). Pendekatan *bottom-up* percaya bahwa implementasi dari kebijakan atau program suatu pembangunan akan berhasil jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal proses hingga akhir (Utami 2018).

2. Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang memandang pentingnya untuk memusatkan perhatian dalam rangka memahami kehidupan sosial. Teori ini menekankan kepada hubungan antara interaksi dan simbol, serta pandangan

pendekatan ini adalah individu. Kehidupan sosial secara harfiah menurut pandangan interaksionisme simbolik adalah interaksi manusia melalui penggunaan simbol-simbol (Jones, Bradbury, and Boutillier 2016).

Interaksionisme simbolik menekankan pada proses interaksi dua arah. Di mana kita tidak hanya harus memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk dari bagaimana ia menginterpretasi perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasi dengan cara tertentu pula (Jones et al. 2016).

Dalam hal ini Weber menyebutnya sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang sangat berarti bagi masyarakat ketika tindakan sosial mencoba mengasumsikan arti secara subjektif sebagaimana halnya yang dilihat dari perhitungan tingkah lalu orang lain dan benar-benar diorientasikan (Kinloch 2009). Dan inti tesis Weber adalah “tindakan yang penuh arti” dari individu. Yang dimaksudkannya dengan tindakan sosial adalah tindakan yang di dalamnya terdapat makna subjektif dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer 2016).

George H. Mead sebagai salah satu teoritikus interaksionisme simbolik menyatakan bahwa terdapat empat tahap yang saling berhubungan di dalam tindakan, yaitu: 1) impuls; 2) persepsi; 3) manipulasi; dan 4) penyelesaian (Ritzer 2014).

Beberapa teoritikus mengemukakan prinsip dari teori interaksionisme simbolik (Ritzer 2014), yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir;

- 2) Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial;
- 3) Dalam interaksi sosial mempelajari makna dan simbol, yang menjadikan manusia berpikir;
- 4) Makna dan simbol menjadikan manusia mampu untuk bertindak dan berinteraksi secara khas;
- 5) Orang mampu memodifikasi makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsiran mereka atas situasi.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Nur Kholifah (2018)	Analisis Pengelolaan Destinasi Ziarah Dalam Konsep SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>) di Kabupaten Demak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata religi di Kota Demak telah mampu mencapai sasaran-sasaran SDGs, seperti destinasi ziarah mampu memberikan semangat terhadap anak-anak dalam pendidikan dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai mitra.
2.	Ayu Oktaviani Musri(2020)	Pelaksanaan Program <i>Sustainable</i>	Metode penelitian yang	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Sosial Kota

		<i>Development Goals</i> oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan	digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Pekanbaru dalam melaksanakan program SDGs dengan tujuan pengentasan kemiskinan memusatkan kepada program-program PKH, PIP, PIS dan BPNT.
--	--	---	---	--

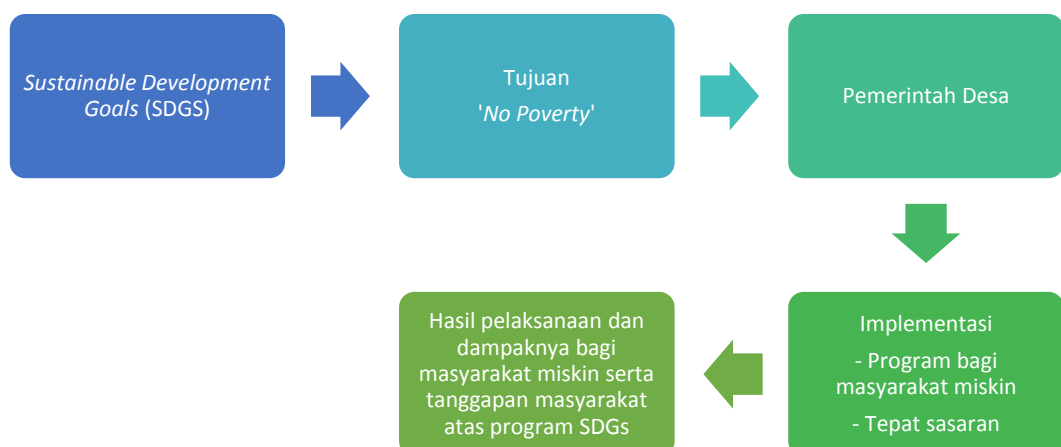
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu jika penelitian yang diteliti oleh Nur Kholifah berfokus kepada pengelolaan destinasi wisata religi dalam konsep SDGs dan Ayu Oktaviani Musri program SDGs mengenai pengentasan kemiskinan dengan lokus penelitian adalah dinas sosial Kota Pekanbaru, maka peneliti lebih melihat implementasi dan konsepsi dari program SDGs mengenai pengentasan kemiskinan dengan lokus pedesaan, yang mana peran pemerintah desa ingin diketahui secara lebih lanjut dalam kebijakan SDGs untuk tujuan penanggulangan kemiskinan.

E. Kerangka Pikir

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu program global yang bertujuan terhadap peningkatan manusia, planet, kesejahteraan, kedamaian dan kerjasama. SDGs sebagai sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan berusaha agar seluruh masyarakat dunia mendapatkan kehidupan yang sejahtera, tanpa ada negara yang tertinggal dalam hal kesejahteraan. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, SDGs mengeluarkan 17 tujuan sebagai program pembangunan berkelanjutan. Dari 17 tujuan, tujuan nomor satu yang ingin dicapai ialah “*No Poverty*” menghilangkan kemiskinan di manapun kemiskinan tersebut berada.

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam *United Nations* (PBB) turut serta mengaplikasikan SDGs ke dalam kebijakan pembangunannya sebagai arah tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Penerapan SDGs tidak hanya di kota-kota, melainkan juga memasuki wilayah pedesaan yang memiliki banyak persoalan mengenai pembangunan. SDGs yang diterapkan di pedesaan bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di desa, terkhusus bagi persoalan kemiskinan yang sebagian besar kemiskinan di Indonesia terjadi di wilayah pedesaan.

Perangkat Desa sebagai pelaksana dari tujuan “*No Poverty*” pada program SDGs berkewajiban untuk melaksanakan tujuan tersebut agar masyarakat pedesaan bisa merasakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya SDGs masyarakat miskin di wilayah pedesaan menjadi semakin berkurang dan sejahtera.



Gambar 1 Kerangka Berpikir